

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG MENYOSIALISASIKAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Aulia Rahman¹ dan Diah Fatma Sjoraida²

¹Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Subang

²Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Terdapat kegiatan yang mengimplementasikan strategi komunikasi pemerintah kabupaten subang untuk mensosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, namun sejauh ini afektivitasnya, belum dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Menyosialisasikan Program “Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat”, khususnya salah satu dari program Kabupaten Subang mengenai pengembangan infrastruktur untuk masyarakat yang disebut GAPURA INTAN (Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat Infrastruktur Berkelanjutan). Penelitian difokuskan pada pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten, bagaimana pemahaman masyarakat, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan hambatan apa saja yang dialami dalam menyosialisasikan program ini ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan menggunakan metode studi kasus. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini adalah, infrastruktur merupakan permasalahan paling mendesak di Kabupaten Subang. Program GAPURA INTAN bertujuan untuk menangani permasalahan infrastruktur seperti salah satunya perbaikan jalan Kabupaten yang rusak sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan program ini kepada masyarakat dengan cara hierarki pemerintahan dan menyosialisasikan kepada masyarakat secara langsung pada berbagai kesempatan yang ada. Namun *awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap program ini masih sangat sedikit yaitu hanya 9% masyarakat yang mengetahui program GAPURA INTAN.

Kata-kata Kunci: Strategi komunikasi, subang, pemerintah kabupaten, infrastruktur, program GAPURA INTAN

GOVERNMENT COMMUNICATION STRATEGY OF SUBANG DISTRICT SOCIALIZE DEVELOPMENT MOVEMENT FOR PEOPLE-SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PROGRAM

ABSTRACT

There is an activity that implements the communication strategy by Subang district government to socialize the “Development Movement for the People” Program, but so far its affectivity, can not be felt optimally. This study aims to determine Government Communication Strategy Of Subang District Socialize “Development Movement For People”, specifically one of the Subang District program related to infrastructure development to society called GAPURA INTAN (Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat-Infrastruktur Berkelanjutan). The research is focused on the understanding of district government apparatus, how the understanding of the community, how the communication strategies undertaken by Subang district government and any obstacles experienced in socializing this program to the community. This research used qualitative approach with constructivism paradigm and case study methods. The technique of determining informants used purposive sampling and the number of informants in this study was 9 people. This research found out that infrastructure is the most urgent problem in Subang Regency, This program aims to deal with infrastructure problems such as one of the repair of damaged district road so it can not be used by the community. Government efforts in communicate this program to the community by government hierarchy and socialize to the community directly on various occasions. However, people awareness of this program is still very little only 9% of people who know the GAPURA INTAN program.

Keywords: *Communications strategy, subang, local government, infrastructure development, GAPURA INTAN program*

Korespondensi: Aulia Rahman, M.I.Kom. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Subang. Jln Dewi Sartika No. 1, Kabupaten Subang. *Email:* abutgoodboy@gmail.com

Submitted: April 2016, **Accepted:** August 2017, **Published:** December 2017

ISSN: 2303-2006 (print), ISSN: 2477-5606 (online). Website: <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk>

Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 48a/E/KPT/2017

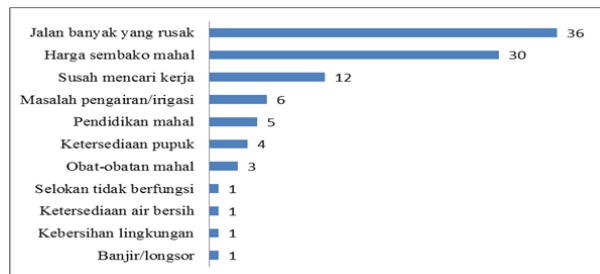
PENDAHULUAN

Pelayanan publik dapat dilihat sebagai usaha dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat atau publik, maka dari itu tentu publik menginginkan adanya pelayanan yang maksimal dari aparat publik terhadap publik itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi publik tersebut, terutama di wilayah Kabupaten Subang, Bupati Subang Ojang Sohandi meluncurkan lima program pembangunan yang dinamakan sebagai Gerakan Pembangunan untuk Rakyat (GAPURA), program ini menasar pada bidang sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan tata kota (Sunarya, 2014).

Keunikan yang membuat peneliti tertarik mengkaji secara lebih mendalam karena Kabupaten Subang merupakan sebuah wilayah yang memiliki budaya sunda kuat, sehingga nampaknya program GAPURA ini pun dibuat berdasarkan nilai-nilai budaya sunda seperti nilai *Rancingeus-Motekar-Disiplin-Pinunggul-Jembar* yang merupakan cerminan dari salah satu GAPURA yaitu GAPURA PERMATA, kemudian nilai *Jalan Leucir-Cai Ngalir-Lembur Caang ku Listrik-Padumukan Resik-Sasak Tohaga* yang mewakili GAPURA INTAN, nilai *Leuga Leutak Pinuh Leuit-Gampang Cabakeun-Gampang Dahareun* yang diangkat dari GAPURA EMAS, kemudian *Pinter-singer-Disiplin-Bener-Bageur-Kuat Akhlak-Ngamumule Budaya* sebagai prinsip dari GAPURA PERAK, dan terakhir adalah nilai *Walagri-Gampang Ngubaran-Berseka-Tumaninah* yang merupakan cerminan dari program GAPURA SERASI. Dengan kata lain pemerintah Kabupaten Subang tidak melupakan warisan budaya dan bahasa nenek moyang dengan penggunaan nilai-nilai budaya lokal sebagai kredo program kerjanya.

Pemerintah adalah institusi yang memiliki kewajiban menyediakan layanan publik bagi kesejahteraan rakyatnya, selain itu negara wajib melayani setiap warga dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Penyelenggaraan layanan publik juga harus membangun kepercayaan masyarakat seiring dengan tuntutan dan harapan publik atas peningkatan kualitas layanan publik (UU No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik) (LSI, 2015).

Meski demikian, masih ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Subang, sehingga merasa perlu menciptakan program GAPURA ini. Permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Subang dapat dilihat dalam Gambar 1.

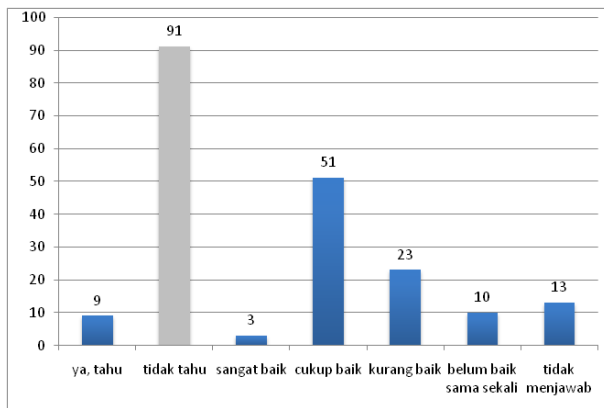


Sumber: Lembaga Survei Indonesia, 2015

Gambar 1 Masalah Mendesak di Kabupaten Subang

Berdasarkan data pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa permasalahan paling banyak ada di Kabupaten Subang adalah permasalahan mengenai infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah menaungi urusan jalan yang rusak, pengairan/ irigrasi, saluran air/ selokan yang tidak berfungsi, keseterediaan air bersih, listrik sering padam, pemukiman kumuh, taman kota dan lain sebagainya (LSI, 2015).

Berdasarkan hasil dari pra observasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa data dan fakta bahwa sampai 2 tahun masa jabatan Bupati Kabupaten Subang, masih banyak masyarakat Kabupaten Subang yang belum mengetahui program kerja dari pemerintah Kabupaten Subang. Dalam sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada bulan Januari – Maret 2015, kepada 820 orang responden yang berasal dari seluruh Kecamatan yang terdistribusi secara proporsional, kurang dari 10% dari keseluruhan responden mengetahui adanya program GAPURA PERMATA, 9% warga Subang yang mengetahui program GAPURA INTAN, 7% warga yang mengetahui program GAPURA EMAS, 8% warga yang mengetahui GAPURA PERAK, dan hanya 8% warga Subang yang mengetahui program GAPURA SERASI. Gambar 2 menunjukkan hasil survei persentase *awereness* masyarakat Kabupaten Subang terhadap GAPURA INTAN yang dilakukan oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia) pada tahun 2015.



Sumber: Lembaga Survei Indonesia, 2015
Gambar 2 Persentase *Awareness* GAPURA INTAN

Kedua hasil survei tersebut dapat dirangkum hasilnya bahwanya 9% masyarakat Kabupaten Subang yang mengetahui program kerja GAPURA INTAN (infrastruktur berkelanjutan) namun pada pelaksanaan programnya dinilai masyarakat Kabupaten Subang cukup baik dengan persentase 51%.

Berdasarkan program kerja GAPURA yang telah dibuat oleh Bupati Kabupaten Subang Ojang Suhandi, lantas bagaimana cara Pemerintah Kabupaten menyosialisasikan program kerja tersebut kepada aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Subang? Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti berhasil mewawancarai Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H Abdurakhman, M, Si. Beliau menjelaskan cara Bupati Subang menyosialisasikan program kerjanya kepada aparatur pemerintahan dan kepada masyarakat Kabupaten Subang sebagai berikut:

“Bupati Kabupaten Subang menyosialisasikan program kerjanya pertama melalui *briefing staff* yang dihadiri oleh seluruh dinas, lembaga dan SKPD di Kabupaten Subang, selanjutnya melalui pertemuan-pertemuan kemasyarakatan seperti kegiatan keorganisasian seperti kegiatan olahraga, kesehatan maupun kegiatan keagamaan, selain itu juga Bupati juga menggunakan jalur media massa seperti pendekatan perss, dan tokoh pembuka masyarakat yang hingga saat ini masih terus di sosialisasikan dari tingkat Kabupaten, kecamatan hingga desa.” (Hasil wawancara dengan Drs. H Abdurakhman, M, Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. Di kantor Pemerintah

Kabupaten Subang Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015)

Government public relations merupakan pendekatan hubungan masyarakat institusi yang berada di dalam ranah birokrasi. Di dalam Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 371/KEP/M. KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan Pasal 6, disebutkan bahwa:

humas pemerintah adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi/perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan eksternal dan membina martabat instansi/pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerja sama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tergambar bahwa humas pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dan “berat”, bukan hanya sekadar melakukan pencitraan lembaga, tetapi juga membawa lembaga pemerintahan ke posisi yang bermartabat terhadap publik internal dan eksternal. Karena itu, secara tersurat maupun tersirat, humas pemerintah harus benar-benar menjadi corong yang ideal dan profesional, yang didukung penuh oleh kepala daerah, publik internal dan publik eksternalnya agar fungsinya maksimal.

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat (humas) yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial. Walaupun humas pemerintahan juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. (Ruslan, 2008: 341) Humas pemerintah lebih menekankan pada *public services* atau demi meningkatkan pelayanan umum.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji kasus ini dari aspek komunikasi, melalui suatu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini layak untuk diteliti karena peneliti telah menemukan permasalahan yang ada di pemerintah Kabupaten Subang sebagai objek penelitian, dan juga kontribusi dari penelitian ini selanjutnya dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Subang dalam membangun reputasi

kepada masyarakat guna menyosialisasikan program kerja yang telah dibuat pemerintah Kabupaten Subang melalui rumusan-rumusan strategi *Public Relations* yang komunikatif dengan para *stakeholders*nya baik internal maupun eksternal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Subang, di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Maksud penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Subang dalam menyosialisasikan program GAPURA INTAN. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat Kabupaten Subang; implementasi strategi komunikasi oleh pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Subang dalam menyosialisasikan program GAPURA INTAN.

Penulis ingin melihat proses komunikasi dalam proses Pemerintah Kabupaten menyosialisasikan program GAPURA kepada masyarakat. Maka dari itu teori yang digunakan adalah teori interaksi simbolik. Teori ini sesuai untuk mengetahui proses interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol dan menjelaskan cara manusia menggunakan simbol-simbol yang dipahami oleh diri dan akan menentukan tindakan mereka dalam interaksi sosial.

Interaksi simbolik yang dikemukakan George H. Mead ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*Mind*) mengenai diri (*Self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan tujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (*Society*) dimana individu tersebut menetap. Dalam *terminology* yang diutarakan Mead, setiap isyarat dan pesan verbal yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting. Simbol yang diberikan oleh orang lain dapat mempengaruhi perilaku seseorang melalui pemberian isyarat, maka individu dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain.

Sesuai dengan pemikiran-pemikiran Mead (dalam West & Turner, 2012: 108), definisi singkat dari tiga ide dasar dari interaksi

simbolik adalah: a. *Mind* (pikiran), kemampuan untuk menggunakan *symbol* yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana setiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interkasi dengan individu lain; b. *Self* (diri pribadi), kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interkasi simbolik adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*the self*) dan dunia luarnya; dan c. *Society* (masyarakat), hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan mausia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Istilah *Public Relations* di Indonesia diterjemahkan menjadi hubungan masyarakat. Jika dilihat dari segi etimologis, *Public Relations* mengandung arti hubungan dengan publik. Pada dasarnya terdapat perbedaan arti antara publik dan masyarakat. Pengertian masyarakat lebih pada *society* sedangkan publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Definisi *Public Relations* yang sangat umum diberikan Jhon E. Marston (dalam Kasali, 2005: 6) sebagai berikut: "*Public Relations is planned, persuasive communications design to influence significant public.*" Kata kunci dari definisi adalah "*planned*", "*persuasive communications*" dan "*significant public*"

International Public Relations Association (IPRA) (dalam Ardianto dan Soemirat, 2012: 14), mendefinisikan *Public Relations* sebagai berikut:

"*Public Relations* adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan, dengan mana organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya memperoleh dan membina pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya atau mungkin yang ada hubungannya dengan menilai pendapat umum diantara mereka dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan mereka, guna mencapai kerja sama yang lebih produktif dan untuk melaksanakan kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan melancarkan informasi yang

berencana dan tersebar luas”

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah sendiri berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan (Hasan, 2010: 22). Namun tinjauan asal kata “pemerintahan” sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*Government*” yang diterjemahkan sebagai “pemerintah” dan “pemerintahan” dalam banyak tulisan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa *Government* tidak selalu memiliki makna pemerintahan, karena Samuel Edward Finer mengartikan kata *government* sebagai *Public Servant* yakni “pelayanan”.

Government Public Relations adalah lembaga humas atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Dalam sebuah organisasi pemerintah (daerah), humas sering diposisikan sebagai corong atau suara dari pimpinan Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan publik, sehingga menjadi posisi yang terhormat, tinggi, strategis, melekat kemampuan dan tanggung jawab. (Effendy 2007: 56)

Suatu program *Public Relations*, baik itu yang berjangka panjang maupun berjangka pendek (untuk satu peristiwa tunggal), perlu direncanakan dengan cermat dan hati-hati, sedemikian rupa sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata. Perencanaan yang matang akan menghasilkan suatu program *Public Relations* yang efektif. Perencanaan program *Public Relations* berdasarkan fakta dan landasan berpikir yang sehat, yang membuat seseorang menjadi tahu arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Perencanaan program *Public Relations* menurut Ruslan (2006: 141) membutuhkan: *A searching look backward*, yaitu penelusuran masa lampau untuk menetapkan faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam situasi yang sedang terjadi; *A deep look inside*, yaitu penelaahan terhadap fakta-fakta dan pendapat yang dipertimbangkan, dipandang dari sudut tujuan organisasi dan keabsahan bobot; *A wide look around*, yaitu melihat

kecenderungan-kecenderungan yang ada pada berbagai aspek (politik, sosial dan ekonomi) di sekeliling kita, serta situasi dan kondisi saat itu; dan *A long, long look ahead*, untuk tujuan dan pelaksanaan program organisasi ditentukan.

Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari berjalannya penelitian tersebut. Semua harus dipetakan dengan jelas sebelum penelitian dimulai. Maka, kerangka pemikiran merupakan suatu dasar yang harus berdiri kokoh untuk membimbing peneliti dalam melakukan penelitiannya supaya peneliti dapat fokus dan tidak melenceng dari permasalahan yang sedang ditelitinya. maka diperlukan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas rumusan masalah, paradigma dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dan sebagainya.

Penelitian ini diangkat berdasarkan adanya fenomena dimana Bupati Subang, Ojang Sohandi meluncurkan lima program pembangunan yang dinamakan sebagai Gerakan Pembangunan untuk Rakyat (GAPURA), program ini menyoasar pada bidang pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan tata kota. Program ini dianggap penting bagi Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan Subang sebagai salah satu Kabupaten termaju di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam rumusan *strategi public realtions* Pemerintah Kabupaten Subang dalam upaya menyosialisasikan program kerja GAPURA INTAN kepada masyarakat dalam kondisi alamiah. Hal ini merujuk kepada yang dikemukakan oleh (Cresswell, 2014: 61-64) Metode kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami, yang didasarkan pada tradisi penelitian dengan metode yang khas, yang meneliti masalah manusia atau masyarakat. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan melakukan penelitian dalam setting alamiah.

Paradigma yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu paradigma

konstruktivisme, seperti yang dipaparkan oleh Denzin dan Lincoln (2005), mengadopsi mengakui adanya fakta dan realitas empirik. Sedangkan konstruktivisme berpendapat bahwa semesta secara epistemologi merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan dunia objek material. Pengalaman manusia terdiri dari interpretasi bermakna terhadap kenyataan dan bukan reproduksi kenyataan. Dengan demikian dunia muncul dalam pengalaman manusia secara terorganisasi dan bermakna. Keberagaman pola konseptual/kognitif merupakan hasil dari lingkungan historis, *cultural*, dan personal yang digali secara terus-menerus. (Denzin & Lincoln, 2005: 97)

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah instansi pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Subang, setiap organisasi pasti memiliki interaksi dan strategi dalam berhubungan dengan para stakeholdersnya atau publiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Subang dalam menyosialisasikan program kerja GAPURA kepada masyarakat. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.

Yin (2011: 31) menyebutkan bahwa studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial serta kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana sumber bukti dimanfaatkan. Secara umum studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang lebih cocok jika pertanyaan penelitian berkenaan dengan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa).

Kasus yang terdapat pada penelitian ini yaitu masih banyak masyarakat Kabupaten Subang yang belum mengetahui program kerja GAPURA yang sedang dijalani Pemerintah Kabupaten Subang. Pertanyaan penelitian “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*) melingkupi bagaimana pemahaman aparatur pemerintahan & masyarakat, strategi komunikasi dan hambatan yang dialami dalam menyosialisasikan program Kerja GAPURA INTAN. Penelitian ini merupakan *a bounded system* yaitu satu kesatuan yang utuh dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Penelitian

ini juga bersifat *single case* dimana tujuan dari program ini adalah menyosialisasikan program GAPURA INTAN kepada masyarakat agar masyarakat, dan pemerintah bisa berkerja sama untuk menjadikan Kabupaten Subang menjadi Kabupaten termaju di Jawa Barat.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 55), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Subang tepatnya di jalan Dewi Sartika No. 1 Subang. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menentukan *key informan* yang akan menjadi narasumber yaitu orang-orang yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Kabupaten Subang dan orang-orang yang merasakan dampak dari adanya Program GAPURA INTAN tersebut.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam proses pengadaan data primer untuk kepentingan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Moleong, 2013: 134).

Penelitian ini lebih menekankan pada wawancara mendalam karena lebih relevan menghasilkan data primer. Untuk penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap responden yang bisa memberikan informasi berhubungan dengan penelitian. Mereka adalah informan yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menghindari bias penelitian, peneliti tetap memiliki pedoman wawancara tersebut bersifat fleksibel, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan data yang terjadi di lapangan. Namun, fleksibilitas tersebut tetap mengacu pada *focus* penelitian yaitu strategi komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam

menyosialisasikan program kerja GAPURA kepada Masyarakat.

Observasi penelitian ini dilakukan di pemerintah Daerah Kabupaten Subang, yaitu dilakukan dengan cara mencatat semua informasi yang dibutuhkan peneliti terhadap informan. Observasi dilaksanakan dengan izin oleh pihak-pihak yang menyangkut penelitian.

Teknik observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme insitusi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi adalah proses pengumpulan data primer dengan menggunakan pengamatan langsung atau meneliti sendiri gejala-gejala dan fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui pencatatan. (Moleong, 2013: 137)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kesempatan wawancara dengan Abdurahkman yang saat ini menjabat sebagai SEKDA Kabupaten Subang, dia mengatakan bahwasanya bekerja tanpa suatu program itu sama halnya dengan berjalan tanpa tujuan. Artinya, penyampaian pesan dalam kegiatan, harus disesuaikan dengan sasaran (Febriyansyah, Christin, & Imran, 2015). Jadi program GAPURA ini adalah acuan dari para aparatur Pemerintah Kabupaten Subang dalam menjalani tugas serta kewajibannya dalam melayani masyarakat. Program GAPURA merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Subang dalam mengemas suatu program, dengan tujuan semua elemen masyarakat di Kabupaten Subang dapat mengetahui akan program kerja yang sedang di canangkan oleh Pemerintah Kabupaten. Isi dari program GAPURA tersebut merupakan urusan-urusan Wajib dan urusan pilihan yang harus di realisasikan oleh pemerintah.

Dengan adanya program ini diharapkan aparatur Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Subang, dimana sejatinya aparatur pemerintahan sebagai abdi negara dan juga abdi masyarakat bertugas untuk melayani masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa: “pelayanan publik yang

transparan dan akuntabel merupakan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya” (Yani, 2017).

GAPURA INTAN merupakan singkatan dari Gerakan Pembangunan Untuk Masyarakat Infrastruktur Berkelanjutan dimana program ini berfungsi untuk memberikan pelayanan infrastruktur yang baik kepada masyarakatnya seperti keseterediaan jalan yang baik, pembangunan infrastruktur seperti jembatan, pengairan, listrik dan lain sebagainya. GAPURA INTAN merupakan satu dari lima program GAPURA yang menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten, dikarenakan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang infrastruktur daerah seperti jalan yang rusak.

Jalan merupakan salah satu bagian dari infrastruktur wilayah yang sangat vital di Kabupaten Subang, seperti pendapat dari Nanang salah satu informan penelitian dia berkata. Kabupaten Subang ini terkenal dengan hasil pertaniannya seperti padi dan palawija, jika jalanan rusak otomatis hasil pertanian jadi sulit untuk di angkut dan susah untuk dijual jadi harga gabah bisa anjlok dan tidak bisa dinikmati oleh para petani yang notabene merupakan masyarakat Kabupaten Subang itu Sendiri. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten harus segera untuk menangani permasalahan infrastruktur jalan yang rusak.

Anggaran APBD untuk merealisasikan GAPURA INTAN untuk tahun 2015 sebesar kurang lebih 300 M, hal ini mengalami lompatan dari tahun-tahun biasanya. Dengan anggaran yang cukup besar untuk program GAPURA INTAN diharapkan aparatur Pemerintah Kabupaten lebih serius dalam menangani masalah infrastruktur yang sedang dialami Kabupaten Subang Program GAPURA INTAN di targetkan akan selesai pada tahun 2018, jadi diharapkan pada tahun 2018 mendatang sudah tidak adalagi keluhan masyarakat di ranah infrastruktur daerah.

Masyarakat Kabupaten Subang yang menjadi informan penelitian sudah mengetahui program GAPURA ini, namun mereka belum begitu merasakan manfaat dari program ini. Mereka menilai program GAPURA ini adalah program yang cukup bagus dari Pemerintah Kabupaten Subang, sebagian dari mereka sepakat GAPURA INTAN adalah salah satu dari kelima program yang cukup diketahui oleh masyarakat. Pengetahuan menjadi faktor

penting dalam perubahan sikap masyarakat, karena “proses perubahan sikap khalayak dimulai ketika informasi menyentuh kesadaran, pemahaman dan pengetahuan khalayak sebagai individu (Umniyati, Hadisiwi, & Suminar, 2017).

Masyarakat Kabupaten Subang banyak mendengar sosialisasi program GAPURA ini langsung dari Bupati di dalam berbagai macam kegiatan seperti acara-acara kemasyarakatan. Yuli salah satu informan penelitian mengatakan, memang sering pak Bupati ataupun wakilnya memperkenalkan program GAPURA apabila sedang diadakannya suatu acara kemasyarakatan, jadi sebelum ke inti acara mereka selalu memperkenalkan program GAPURA serta sejauh mana program ini telah direalisasikan di Kabupaten Subang.

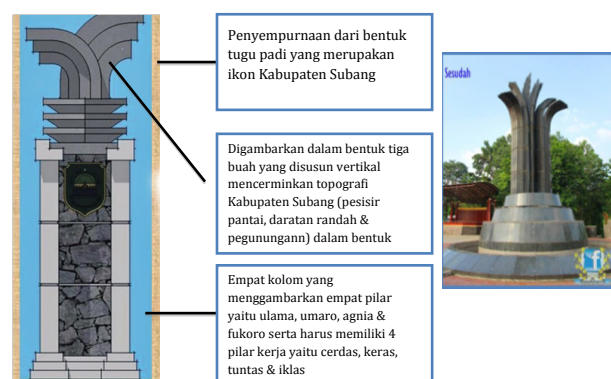
Bupati Kabupaten Subang Ojang Sohandi biasanya langsung menyosialisasikan program GAPURA kepada masyarakat didalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, selanjutnya dengan cara hierarki pemerintahan atau dengan system getok tular dimana beliau memberikan pemahaman mengenai program ini kepada seluruh SKPD, SEKDA, kepala dinas serta camat hingga kepala desa agar mereka dapat menyosialisasikan kepada masyarakat di berbagai kesempatan atau dalam berbagai acara. Hal seperti ini dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kesetrdian informasi mengenai program GAPURA kepada publiknya. Seperti yang tercantum dalam dalam UU nomor 14 tahun 2008 mengenai hak dari publik, di antaranya: Hak untuk memperoleh informasi publik; Hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik; Hak untuk menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum; Hak untuk mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan; Hak untuk menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan undang-undang; Hak untuk mengajukan permintaan informasi; Hak untuk mengajukan gugatan pengadilan apabila mendapatkan hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi publik.

Memberikan informasi kepada publik atau masyarakat Bupati dalam upayanya dalam menyosialisasikan program GAPURA INTAN memberikan informasi kepada publiknya seperti sudah sejauh mana program ini telah terealisasikan. Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari

bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, UU Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat pemerintah dan pemerintah daerah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik (Setieman, 2013: 197).

Upaya sosialisasi program GAPURA ini sebenarnya adalah tugas dari humas pemerintahan di bawah dinas INFOKOM (Informasi dan Komunikasi) Kabupaten Subang, tetapi Bupati menghimbau kepada seluruh SKPD serta aparat pemerintah lainnya agar ikut serta dalam menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Subang pun membangun tugu GAPURA di setiap kantor, batas wilayah, sekolah, hingga objek wisata guna menyosialisasikannya kepada masyarakat. Gambar 3 adalah gambar serta penjelasan dari tugu GAPURA yang dijadikan ikon kota Subang dan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat.



Sumber: Penelitian, 2016

Gambar 3 Penjelasan Arti Tugu GAPURA

Dalam menjalankan sebuah program tentu saja akan mengalami hambatan, begitupun yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Subang dalam menyosialisasikan program GAPURA, berikut ini adalah beberapa hambatan yang dialami. Pemerintah Kabupaten Subang menilai masih ada aparat pemerintahan seperti camat dan kepala desa yang dinilai masih kurang menyosialisasikan program ini kepada masyarakatnya, sehingga berdasarkan hasil survei hanya kurang dari 10% masyarakat Kabupaten Subang yang mengetahui akan program GAPURA.

Sumber daya manusia yang masih kurang

peduli akan hadirnya program GAPURA, dimana masyarakat hanya ingin hidupnya sejahtera tanpa memperdulikan prosesnya. Keseterediaan anggaran dalam perealisasi program ini, untuk merealisasikan keseluruhan program GAPURA tentunya memerlukan anggaran yang sangat besar, maka dari itu Pemerintah Kabupaten baru bisa memilah program mana yang di dahulukan untuk di realisasikan, untuk saat ini program GAPURA INTAN adalah program yang menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Subang untuk direalisasikan kepada masyarakat. Masih diperlukan optimalisasi mengenai pemilihan segmen yang tepat untuk menyosialisasikan program ini ke masyarakat Kabupaten Subang.

Mind seluruh elemen masyarakat Kabupaten Subang (termasuk didalamnya aparatur Pemerintah Kabupaten Subang dan masyarakat) belum seluruhnya mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan GAPURA sebagai program kerja pemerintah daerah, termasuk didalamnya program GAPURA INTAN. Namun sebagian dari masyarakat berasumsi bahwa program ini masih belum cukup dirasakan manfaatnya, mengingat program GAPURA INTAN masih terhitung cukup baru kehadirannya yaitu kurang lebih 2 tahun dan ditargetkan akan rampung pada jangka waktu 5 tahun. Sehingga Pemerintah Kabupaten Subang masih mempunyai sisa waktu 3 tahun lagi untuk merealisasikan program ini kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui program kerjanya dan turut merasakan manfaatnya dari program ini.

Di dalam *self* Pemerintah Kabupaten Subang bersama dengan para aparatur pemerintahannya berusaha menyosialisasikan program GAPURA INTAN kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai program ini. Saluran komunikasi langsung atau tatap muka masih menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten dalam mengkomunikasikan program GAPURA INTAN juga pembangunan tugu GAPURA yang menyebar di seluruh Kabupaten Subang.

Ketika sebagai *society*, penting untuk seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Subang memiliki awareness serta menyamakan persepsi mengenai program GAPURA sehingga dapat mengurangi hambatan-hambatan yang dialami dalam proses menyosialisasikan program ini, sehingga pada akhirnya dapat

mewujudkan misi Kabupaten Subang untuk menjadi daerah termaju di Jawa Barat.

SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Subang kurang maksimal dalam upaya menyosialisasikan program GAPURA kepada masyarakat, terlihat hanya sosialisasi secara langsung yang menjadi andalan dari Pemerintah Kabupaten Subang. Sedangkan upaya sosialisasi menggunakan alat media masih cenderung minim. Mereka hanya fokus terhadap bagaimana program ini dapat cepat terealisasi sementara publik mempunyai hak mendapatkan informasi mengenai program kerja atau kinerja pemerintahannya yang tercantum pada dalam UU nomor 14 tahun 2008.

Masyarakat Kabupaten Subang belum seluruhnya mengetahui program GAPURA ini, namun sebagian dari mereka merasakan manfaat dari program tersebut. Mereka menilai program GAPURA ini adalah program yang cukup bagus dari Pemerintah Kabupaten Subang, sebagian dari mereka sepakat GAPURA INTAN adalah salah satu dari kelima program yang dinilai cukup dirasakan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Subang mendengar sosialisasi program GAPURA ini langsung dari Bupati di dalam kegiatan seperti acara-acara kemasyarakatan dan blusukan dari Bupati ke tengah masyarakat.

Bupati Kabupaten Subang Ojang Sohandi biasanya langsung menyosialisasikan program GAPURA kepada masyarakat di dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, selanjutnya dengan cara *hierarki* pemerintahan atau dengan *system getok tular* dimana beliau memberikan pemahaman mengenai program ini kepada seluruh SKPD, SEKDA, kepala dinas serta camat hingga kepala desa agar mereka dapat menyosialisasikan kepada masyarakat di berbagai kesempatan atau dalam berbagai acara. Upaya sosialisasi program GAPURA ini sebenarnya adalah tugas dari humas pemerintahan di bawah dinas INFOKOM (Informasi dan Komunikasi) Kabupaten Subang, tetapi Bupati menghimbau kepada seluruh SKPD serta aparatur pemerintah lainnya agar ikut serta dalam menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Subang menilai masih ada aparatur pemerintahan seperti

camat dan kepala desa yang dinilai masih kurang menyosialisasikan program ini kepada masyarakatnya, sehingga berdasarkan hasil survei kurang dari 10% masyarakat Kabupaten Subang yang mengetahui akan program GAPURA. Keseterediaan anggaran dalam perealisasi program ini untuk merealisasikan keseluruhan program GAPURA memerlukan anggaran yang sangat besar, maka dari itu Pemerintah Kabupaten harus memilah program mana yang didahulukan untuk direalisasikan. Untuk saat ini program GAPURA INTAN adalah program yang menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Subang untuk direalisasikan kepada masyarakat. Masih diperlukan optimalisasi mengenai pemilihan segmen yang tepat untuk menyosialisasikan program ini ke masyarakat Kabupaten Subang.

Saran dari peneliti pribadi untuk penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Subang sebagai objek penelitian secara umum sudah melakukan kegiatan komunikasi khususnya kegiatan *Public Relations* baik secara internal maupun eksternal. Kegiatan komunikasi secara internal dinilai sudah cukup baik hal ini terbukti dengan sudah adanya pemahaman mengenai program GAPURA INTAN pada aparatur Pemerintah Kabupaten dengan baik, para aparatur Pemerintah Kabupaten dapat memberikan banyak informasi kepada peneliti dengan sangat baik, hal ini membuktikan bahwa Bupati sebagai pemimpin tertinggi pemerintah Kabupaten Subang sudah melakukan kegiatan komunikasi internal Pemerintah Kabupaten dengan baik.

Namun kegiatan komunikasi kepada eksternal Pemerintah Kabupaten yaitu kepada masyarakat Kabupaten Subang dirasa belum begitu terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan masih banyak dari masyarakat Kabupaten Subang yang masih belum mengetahui program GAPURA INTAN, selanjutnya respon masyarakat mengenai program ini juga belum terlalu dirasakan manfaatnya.

Program ini belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat dan juga dirasakan manfaatnya disebabkan karena belum maksimalnya upaya Pemerintah Kabupaten terutama bidang Humas dalam menyosialisasikannya kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Subang masih menggunakan cara yang dinilai monoton dengan menyosialisasikan program ini yaitu melalui pidato aparatur pemerintah,

melalui baligo atau spanduk, dan melalui bantuan berbagai media dan lain sebagainya. Instansi Humas Pemerintah Kabupaten harus mempunyai lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyosialisasikan program ini. Karena belum maksimalnya kegiatan dalam menyosialisasikan program ini maka hambatan-hambatan pun banyak bermunculan seperti hambatan dari aparatur Pemerintah Kabupaten itu sendiri hingga permasalahan anggaran dalam merealisasikan program GAPURA INTAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E. & Soemirat, S. (2002). *Dasar-dasar public relations*. Cetakan. Ketiga. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Creswell, J. W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2005). *The handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications
- Effendy, O. U. (2007). *Ilmu komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Febriyansyah, A. R., Christin, M., & Imran, A. I. (2015). Strategi media relations pt. pelabuhan tanjung priok dalam menanggapi krisis. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4/2, 229–241
- Hasan, E. (2010). *Komunikasi pemerintahan cetakan kedua*. Bandung: Refika Aditama
- Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan*
- LSI (Lembaga Survei Indonesia), *Survei kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan di kabupaten subang. Temuan Survei Januari-Maret 2015*
- Moleong. (2013). *Metodologi kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ritzer, G. & Goodman, D. J. (2006). *Teori sosiologi modern*. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah. Jakarta: Pustaka Kencana
- Ruslan, R. (2006). *Manajemen public relations & media komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Setiawan, A., Sugiana, D. & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 1, No. 2. <http://journal.unpad.ac.id/jkk/issue/archive>

- diakses tanggal 11 oktober 2015
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarya, R. (2014). *Lima program andalan pemerintah kabupaten subang*. Diakses dari <http://www.rakyatsubang.com>
- Umniyati, N., Hadisiwi, P., & Suminar, J. R. (2017). Pengaruh terpaan informasi riset melalui website www.ppet.lipi.go.id terhadap sikap mahasiswa mengenai penelitian. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5/1, 111–120
- West, R. & Turner, L. H. (2012). *Pengantar teori komunikasi*. Terjemahan: Maria Natalia. Jakarta. Salemba Humanika
- Yani, E. (2017). Analisis relasi teknologi, institusi dan agensi dalam transformasi pelayanan publik di jakarta. *Jurnal Informasi*, 47/1
- Yin, R. K. (2011). *Studi kasus: disain dan metode*. Jakarta: Gramedia Pustaka